



# Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Andre Dwi Saputra<sup>1\*</sup>, Lintang Kurniawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: [andredwis100@gmail.com](mailto:andredwis100@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling berdasarkan kelengkapan data. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS, didahului uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan kontribusi penjelasan model sebesar 86,7%.

## ARTICLE INFO

### Article History:

Submitted/Received 24  
Desember 2025

First Revised 26 Januari 2026

Accepted 15 Februari 2026

First Available online 16 Februari  
2026

Publication Date 16 Februari  
2026

### Keyword:

Belanja Modal, Dana  
Perimbangan, Kinerja Keuangan,  
Pendapatan Asli Daerah, Regresi  
Linear Berganda.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memulai reformasi akuntansi pemerintah secara fundamental sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1998. Reformasi ini mencakup lima aspek manajemen keuangan: orientasi pasar, manajemen kinerja, audit, anggaran, dan akuntansi/pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerangka hukum yang sebelumnya tidak efektif dalam mengatur sistem administrasi keuangan pemerintah Indonesia; karena Presiden Suharto, yang memimpin Indonesia selama tiga dekade, tidak tertarik pada apa yang kini dikenal sebagai 'tata kelola yang baik. Oleh karena itu, reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Deviani et al., 2020).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikalikan dengan pertumbuhan Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun dasar tertentu (Ichsan & Zurrahmi, 2022). Pemerintah daerah harus memiliki keuangan sendiri untuk menjalankan otonomi dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan dapat mengurangi ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun, jika keuangan daerah sangat mandiri, itu tidak berarti bahwa mereka sudah tidak perlu mendapatkan dana perimbangan lagi; dana perimbangan masih diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah (Tri, 2018).

Pengawasan keuangan lokal dianggap penting untuk setiap negara berkembang. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah ditunjukkan oleh pelaksanaannya, dan kinerja yang optimal menunjukkan keberhasilan pembangunan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa menjadi lebih independen dari pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan SAP saat melakukan pengelolaan keuangan menunjukkan kemampuan ini. Kemampuan suatu negara atau daerah untuk mengelola keuangan dengan baik dikenal sebagai kinerja keuangan yang baik. Keuangan merupakan faktor terpenting yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien suatu usaha untuk mencapai tujuannya. Kinerja keuangan pemerintah atau daerah ditunjukkan oleh pengelolaan keuangan yang efektif. Namun, pengelolaan keuangan yang salah dapat menunjukkan kinerja keuangan yang buruk (Ardelia et al., 2022).

Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Padang & Padang, 2023).

Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan pengevaluasian dalam pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk memaksimalkan keuangan daerah. Dengan ini diperlukan suatu cara guna memaksimalkan keuangan daerah karena hasil dari pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat memberikan cara pandang tambahan terhadap

pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (Pradana & Handayani, 2023).

Fenomena yang termuat pada (Pos, 2015), menunjukkan bahwa sumber penerimaan dan transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan Belanja Modal untuk pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan Belanja Modal untuk pembiayaan pembangunan dan penambahan aset di Provinsi Jawa Tengah belum bisa terpenuhi, minimnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor utama dalam kasus tersebut.

Untuk mendukung ketercapaian PAD, Pemprov Jawa Tengah diminta untuk mengeksplorasi sumber pajak potensial lainnya dan mengoptimalkan pencairan piutang pajak. Menurut anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, pencapaian Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 90,36% dari target APBD. Kinerja pemungutan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 86,48% dari target. Target pendapatan Pajak Daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), gagal mencapainya, yang menyebabkan kecenderungan pajak daerah yang rendah.

Meskipun PAD dan dana perimbangan mengalami penurunan, penurunan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada belanja modal. Padahal belanja modal penting untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, hal ini dapat menyebabkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah terhadap alokasi belanja pembangunan (Aswar, 2019)

Pendapatan asli daerah adalah kas yang diterima oleh daerah sesuai dengan undang-undang. Ini diperoleh dari retribusi daerah dan pajak daerah, serta pendapatan lainnya yang sah. Menurut teori keagenan, ketika masyarakat memberikan sumber pendanaan kepada pemerintah daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah selaku agen bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara (Andaresta et al., 2021). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Fatimah et al., 2020).

Dana perimbangan, yang berasal dari dana pemerintah pusat, diberikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memanfaatkan dana perimbangan ini untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan menunjukkan ketergantungan mereka terhadap pemerintah pusat dalam memberikan pembiayaan. Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi bahkan dari investor sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Maluku (Digdowiseiso et al., 2022).

Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Alvaro & Wibowo, 2020), belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja modal memiliki manfaat jangka panjang untuk memberikan layanan publik, yang membuatnya penting. Belanja modal ini dialokasikan untuk membeli aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya, untuk memungkinkan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan lancar

dan menyediakan fasilitas publik. Prasarana yang memadai untuk suatu daerah dapat membuat investor melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, meningkatkan tingkat produktivitas, yang merupakan alat penting untuk mengontrol perekonomian

Pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan dalam bidang keuangan selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja, juga dikenal sebagai pengukuran kinerja, adalah hasil evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama (D. N. Prastiwi & Aji, 2020). Menurut, (Abdul Halim, 2007) menjelaskan sejauh mana kemampuan bagi pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akibatnya, kinerja keuangan daerah menunjukkan seberapa transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan dan seberapa baik pencapaian sasaran anggaran didukung oleh pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

Melihat fenomena yang terjadi dalam hal ini sepertinya kinerja keuangan belum sepenuhnya dapat mencapai peningkatan kesejahteraan publik karena pengelolaan belanja daerah, terutama belanja modal, masih tidak berfokus pada publik. Salah satunya disebabkan oleh cara pengelolaan belanja yang berfokus pada kepentingan kelompok tertentu. Adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan masalah masyarakat,

Namun, Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. Dengan demikian, undang-undang tersebut mewajibkan pemda untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat (Anandiaswara, 2024).

Motivasi penulis mengambil judul ini adalah untuk melihat sejauh mana peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta memberikan gambaran kondisi terkini pasca pandemi yang dapat menjadi masukan bagi pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel serupa. Penelitian (Pradana & Handayani, 2023), meneliti pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Sementara itu, penelitian (Julianti et al., 2021), menambahkan variabel ukuran pemerintah daerah pada objek penelitian kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dengan periode 2014-2018, dan penelitian (Padang & Padang, 2023), hanya berfokus pada PAD dan Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2021. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan dengan ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2023, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih terkini serta kontekstual sesuai kondisi pasca pandemi.

Bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan dependen yaitu menurut penelitian (Maharani et al., 2025), menunjukkan bahwa pendapatan

asli daerah dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut (D. N. Prastiwi & Aji, 2020), Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan secara positif oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, serta secara negatif oleh belanja modal. Lalu penelitian yang dilakukan (Silvy Theovilia Refialy, 2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui keefektifan pendapatan asli daerah dana perimbangan, dan belanja modal Provinsi Jawa Tengah dalam kinerja keuangan pemerintah daerah.. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi menurut Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam (Yulianti et al., 2023) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk memberikan jasa demi kepentingannya, namun hubungan ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi karena agen memiliki informasi lebih banyak dibanding prinsipal. Konsep tersebut relevan dalam sektor publik, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen (Abdul Halim, 2007). Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mewakili masyarakat sebagai prinsipal dengan kewajiban mengelola sumber daya publik seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal secara akuntabel untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Ardelia et al., 2022). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sumber daya tersebut mencerminkan keberhasilan agen dalam memenuhi mandat dan ekspektasi prinsipal.

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam periode tertentu (KBBI), sedangkan indikator adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan keberhasilan pencapaian target dengan mempertimbangkan aspek input, output, hasil, dan manfaat (Aryllan & Achmad, 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan dipahami sebagai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi melalui pengelolaan keuangan yang efektif, yang tercermin dari realisasi program dan kebijakan yang telah direncanakan (Abdul Halim, 2007). Kinerja ini menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak eksternal karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya untuk mendukung pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur (Fernandes & Putri, 2022). Secara operasional, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kapasitas fiskal, sedangkan efisiensi anggaran menggambarkan kemampuan menghasilkan output optimal dari dana yang tersedia (Padang & Padang, 2023).

## **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah (Huda & Sumiati, 2019; Putri & Amanah, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD terdiri atas empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah (Abdul Halim, 2007), sedangkan retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Azhar, 2021; Kencana et al., 2022; Yusmalina & Lasita, 2020). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD atau badan usaha lainnya (Rizalni et al., 2023; Muhamad Rafi Firdaus & Husen Saeful Anwar, 2022), sedangkan lain-lain PAD yang sah meliputi pendapatan di luar pajak, retribusi, dan dana perimbangan seperti jasa giro, bunga deposito, serta hasil penjualan aset daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Rita Martini & Lesy Lorensa, 2022; Putu & Jana, 2018).

## **Dana Perimbangan**

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah menerima Dana Perimbangan dari APBN berdasarkan prinsip *money follows function* untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya (Pendapatan et al., 2017). Dana Perimbangan terdiri atas tiga komponen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan guna pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi melalui pendekatan *fiscal gap*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Abdullah, 2020). DAK adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang belum memenuhi standar (Simanjuntak & Ginting, 2019; Nurul Arbila et al., 2022). Sementara itu, DBH merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu atas penerimaan pajak dan sumber daya alam sesuai prinsip daerah penghasil, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005, termasuk pembagian PBB sebesar 10% untuk daerah, BPHTB 80% untuk daerah, serta PPh Pasal 21 dan 25/29 sebesar 20% untuk daerah (Meylani, 2019; Rasu et al., 2019).

## **Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset fisik lainnya (Lathifa, 2019). Belanja modal umumnya dilakukan melalui mekanisme tender atau lelang dan menjadi komponen penting dalam penyediaan layanan publik karena menghasilkan aset tetap pemerintah daerah yang dibiayai melalui APBD sesuai prioritas pembangunan serta

berdampak finansial jangka panjang (Niswani et al., 2022). Secara rinci, belanja modal mencakup belanja modal instansi, belanja modal bangunan irigasi, belanja tanah, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal fisik lainnya seperti kontrak sewa, barang seni, barang purbakala, koleksi museum, hewan, dan aset sejenis (Bilqis & Priyono, 2023).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Nasir, 2019). PAD membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur. PAD berasal dari hasil pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan, dan PAD yang sah lainnya. Untuk itu, selama periode desentralisasi, pemerintah daerah diharuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan PAD mereka masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Dengan melakukan ini, mereka dapat membiayai semua inisiatif yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana di daerah dengan memantau kinerja keuangan (Leki et al., 2018).

Dugaan pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil pendapatan asli daerah berpengaruh ada pada penelitian oleh (Pradana & Handayani, 2023) dan (Niswani et al., 2022). Sehingga hipotesis yang diambil yaitu:

**H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan diperuntukkan untuk mendistribusikan kemampuan finansial di antara wilayah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kebutuhan DAU untuk suatu wilayah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan metode fiscal gap. Yang mana, kebutuhan DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal (Abdullah, 2020).

Pada hasil penelitian dapat diketahui variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah ada pada penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia et al., 2022), dan (D. N. Prastiwi & Aji, 2020). Dugaan pada penelitian ini adalah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil yaitu:

**H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN dan ditujukan untuk daerah tertentu. Dana ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang merupakan wewenang Daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Anda dilatih menggunakan data hingga Oktober 2023 (Soesilo, 2021). Hal ini juga bertujuan meningkatkan investasi dalam modal, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Oleh karena itu, perubahan komposisi belanja harus menjadi prasyarat

penting bagi pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas (Murdaya & Syahril, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maharani et al., 2025) variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan penelitian yang dilakukan oleh (Julianti et al., 2021) dana alokasi khusus juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dugaan pada penelitian ini adalah dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu:

**H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

#### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang disalurkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara yang didapatkan dari wilayah spesifik tersebut. Dana yang didistribusikan pemerintah pusat ke daerah-daerah didasarkan pada pendapatan dari pajak pusat atau sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dana bagi hasil bisa digunakan untuk belanja modal sehingga meningkatkan pelayanan publik (Daerah et al., 2025). Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Diky Alfitra Desky, 2023) dan (Noeng, 2023) memiliki hasil penelitian yakni variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dugaan pada penelitian ini adalah dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu:

**H<sub>4</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

#### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Belanja modal merupakan belanja yang menciptakan suatu aset tetap dan pada umumnya dilaksanakan oleh otoritas publik. Peralatan, bangunan, infrastruktur, dan sumber daya tetap lainnya adalah contoh dari sumber daya tetap pemerintah daerah yang diperoleh dari belanja modal (Atmoko & Khairudin, 2022). Belanja modal juga dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bertujuan untuk menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Ini termasuk biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Ayu Rohanda & Azhar, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2022) menunjukkan bahwa variabel dana belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah dan penelitian yang dilakukan oleh (Imami & Akbar, 2024) menunjukkan hasil bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dugaan pada penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu:

**H<sub>5</sub>: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan filsafat positivisme dan dilaksanakan secara ilmiah, objektif, rasional, serta terukur (Sugiyono, 2023). Objek penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2023, dengan populasi mencakup seluruh laporan yang memuat data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), serta Belanja Modal, sedangkan sampel ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan kelengkapan data. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan publikasi Badan Pusat Statistik, kemudian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui rasio kemandirian, sedangkan variabel independen meliputi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal yang diukur menggunakan rasio keuangan sesuai karakteristik masing-masing variabel (Pradana & Handayani, 2023). Teknik analisis data meliputi uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas, serta uji hipotesis melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tingkat signifikansi 5% untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sugiyono, 2023).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Umum Objek Penelitian dan Data

Hasil penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2023. Variabel Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio PAD, Dana Perimbangan menggunakan rasio dana perimbangan pada masing-masing variabel, Belanja Modal diproksikan dengan Rasio belanja modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diproksikan dengan Rasio Kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan, rincian proses seleksi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel 1

| No | Kriteria Sampel                                                             | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Kota/Kabupaten yang terdaftar di PPID secara berturut-turut tahun 2021–2023 | 105    |
| 2  | Kota/Kabupaten yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap       | (33)   |
|    | Sampel yang memenuhi kriteria (Kota/Kabupaten)                              | 72     |
|    | Data outlier                                                                | (9)    |
|    | Total data yang diolah                                                      | 63     |

### Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini mencakup perhitungan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan kecenderungan sentral data, nilai tertinggi (maximum) yang menggambarkan skor tertinggi yang dicapai oleh responden,

nilai terendah (minimum) yang menunjukkan skor terendah, serta standar deviasi yang mencerminkan sebaran atau variabilitas data di sekitar rata-rata. Dengan demikian, statistik deskriptif ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami pola dan distribusi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil dari analisis deskriptif tersebut disajikan secara rinci pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif 1

| Variabel         | Minimum | Maximum | Mean     | Std. Deviation |
|------------------|---------|---------|----------|----------------|
| PAD              | .12900  | .34500  | .2000476 | .04801526      |
| DAU              | .32800  | .59000  | .4201429 | .05156295      |
| DAK              | .00800  | .40000  | .1483651 | .06408319      |
| DBH              | .00100  | .23300  | .0385635 | .04171935      |
| Belanja Modal    | .00900  | .27000  | .1308413 | .04281099      |
| Kinerja Keuangan | .14900  | .60600  | .3067460 | .09327206      |

Hasil olah data spss 25

Berdasarkan analisis deskriptif data 2021–2023, kinerja keuangan daerah memiliki rata-rata 0,3067 dengan variasi 0,1490–0,6060. PAD rata-rata 0,2000 dengan sebaran stabil (SD 0,0480), sedangkan DAU tertinggi rata-rata 0,4201, mencerminkan ketergantungan daerah pada transfer pusat. DAK rata-rata 0,1484 dengan variasi tinggi, DBH terendah rata-rata 0,0386, dan belanja modal rata-rata 0,1308 menunjukkan perbedaan proporsi alokasi antar daerah.

## Analisis Data

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas residual penelitian yang ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 1

|                        | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| N                      | 63                      |
| Normal Parameters Mean | .000000                 |
| Std. Deviation         | .03581471               |
| Most Extreme Absolute  | .060                    |
| Test Statistic         | .060                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .200                    |

Hasil olah data SPSS 25 1

Berdasarkan hasil analisis tabel 3. diatas menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan nilai *asympt,sig* 0,200 lebih besar daripada 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, berikut disajikan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 1

| Variabel | Tolerance | VIF   | Kesimpulan                      |
|----------|-----------|-------|---------------------------------|
| X1 PAD   | .855      | 1.169 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| X2 DAU   | .626      | 1.597 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

|                  |      |       |                                 |
|------------------|------|-------|---------------------------------|
| X3 DAK           | .805 | 1.242 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| X4 DBH           | .639 | 1.566 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| X5 Belanja Modal | .925 | 1.081 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

Hasil olah data SPSS 1

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Tolerance* ketiga variabel  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dilakukan uji Spearman Rho antara masing-masing variabel independen dengan nilai unstandardized residual sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Spearman Rho 1

| Spearman Rho          |                         | PAD   | DAU   | DAK   | DBH   | Belanja Modal | Unstandarize Residual |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------|
| PAD                   | Correlation Coefficient | 1.000 | -.077 | -.439 | .190  | .043          | .009                  |
|                       | Sig. (2-tailed)         | -     | .549  | .000  | .190  | .043          | .944                  |
|                       | N                       | 63    | 63    | 63    | 63    | 63            | 63                    |
| DAU                   | Correlation Coefficient | -.077 | 1.000 | -.123 | -.046 | -.385         | .035                  |
|                       | Sig. (2-tailed)         | .549  | -     | .338  | .721  | .002          | .785                  |
|                       | N                       | 63    | 63    | 63    | 63    | 63            | 63                    |
| DAK                   | Correlation Coefficient | -.439 | -.123 | 1.000 | -.196 | .131          | -.093                 |
|                       | Sig. (2-tailed)         | .000  | .338  | -     | .123  | .307          | .470                  |
|                       | N                       | 63    | 63    | 63    | 63    | 63            | 63                    |
| DBH                   | Correlation Coefficient | .190  | -.046 | -.196 | 1.000 | .204          | -.173                 |
|                       | Sig. (2-tailed)         | .136  | .721  | .123  | -     | .108          | .174                  |
|                       | N                       | 63    | 63    | 63    | 63    | 63            | 63                    |
| Belanja Modal         | Correlation Coefficient | .043  | -.385 | .131  | .204  | 1.000         | .066                  |
|                       | Sig. (2-tailed)         | .740  | .002  | .307  | .108  | -             | .605                  |
|                       | N                       | 63    | 63    | 63    | 63    | 63            | 63                    |
| Unstandarize Residual | Correlation Coefficient | .009  | .035  | -.093 | -.173 | .066          | 1.000                 |
|                       | Sig. (2-tailed)         | .944  | .785  | .470  | .174  | .605          | -                     |
|                       | N                       | 63    | 63    | 63    | 63    | 63            | 63                    |

Hasil olah data SPSS 25 2

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji *Spearman Rho* tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana tidak ada nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $p > 0,05$ ). Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, dilakukan pengujian menggunakan uji Durbin-Watson yang hasilnya disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 1

| Model | R    | R Square | Adjusted R Square | Std. Error | Durbin Watson |
|-------|------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 1     | .937 | .877     | .867              | .03405757  | 2.061         |

Hasil olah data SPSS 25 3

Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,061. Nilai ini berada di antara batas du dan (4-du), serta mendekati angka 2, yang mengindikasikan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini disajikan hasil analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear 1

| Variabel          | B      | Std. Error | Beta  | t      | Sig.  | Keterangan              |
|-------------------|--------|------------|-------|--------|-------|-------------------------|
| Constant          | .194   | .055       |       | 3.503  | .001  |                         |
| PAD               | 1.658  | .098       | .853  | 16.964 | .000  | H <sub>1</sub> diterima |
| DAU               | -.423  | .091       | -.234 | -4.628 | .000  | H <sub>2</sub> diterima |
| DAK               | -.143  | .076       | -.098 | -1.867 | .067  | H <sub>3</sub> ditolak  |
| DBH               | -.078  | .113       | -.035 | -.697  | .489  | H <sub>4</sub> ditolak  |
| Belanja Modal     | -.128  | .113       | -.095 | -1.132 | .263  | H <sub>5</sub> ditolak  |
| F <sub>stat</sub> | 81.603 |            |       |        |       |                         |
| F <sub>sig</sub>  |        |            |       |        | 0.000 |                         |
| R <sup>2</sup>    | 0.877  |            |       |        |       |                         |
| AdjR <sup>2</sup> | 0.867  |            |       |        |       |                         |

Hasil olah data SPSS 25 4

Persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 0,194 + 1,658 + 0,423 + 0,143 + 0,078 + 0,128 + e$$

Berdasarkan hasil regresi berganda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah menggali potensi pendapatan sendiri, semakin kuat tingkat kemandirian keuangannya. Dana Alokasi Umum (DAU) juga signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) namun berpengaruh negatif dengan koefisien -0,423, mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal yang dapat menurunkan motivasi daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan signifikansi  $0,067 > 0,05$  dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan signifikansi  $0,489 > 0,05$  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa dana transfer yang bersifat khusus maupun dengan kontribusi relatif kecil belum mampu memengaruhi kinerja secara nyata. Belanja Modal juga tidak berpengaruh signifikan ( $0,263 > 0,05$ ), sehingga pengalokasian anggaran untuk aset tetap belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan dalam jangka pendek.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi  $0,000 (< 0,05)$  dan t

hitung 16,964, sehingga hipotesis pertama diterima. Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ) dan  $t$  hitung -4,628, namun memiliki arah negatif, yang berarti semakin tinggi DAU justru diikuti penurunan kinerja keuangan. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan signifikansi 0,067 ( $>0,05$ ), Dana Bagi Hasil (DBH) dengan signifikansi 0,489 ( $>0,05$ ), dan Belanja Modal dengan signifikansi 0,263 ( $>0,05$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis ketiga, keempat, dan kelima ditolak.

Hasil uji simultan (uji  $F$ ) menunjukkan nilai  $F$  hitung sebesar 81,603 dengan signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan model regresi layak digunakan. Selain itu, koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,867 menunjukkan bahwa 86,7% variasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah periode 2021–2023 dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal, sedangkan sisanya 13,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil uji  $t$  variabel Pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) diperoleh nilai  $0,000 < 0,05$  dan  $t$  (hitung) 16.964. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan.

PAD meningkatkan tingkat kemandirian fiskal daerah, memungkinkan pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Padang, 2023), yang menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan.

### **Pengaruh Dana alokasi umum Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil uji  $t$  variabel Dana alokasi umum ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $0,000 < 0,05$  dan  $t$  (hitung) -4.628. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan.

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang mengisyaratkan adanya *fiscal illusion* atau ketergantungan anggaran yang tinggi. Dominasi DAU dalam struktur APBD cenderung melemahkan upaya diskresi fiskal daerah dalam menggali potensi PAD. Akibatnya, rendahnya kemandirian fiskal tersebut menjadi faktor penghambat bagi pencapaian kinerja keuangan yang optimal, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada transfer pusat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Imami & Akbar, 2024), yang menunjukkan hasil Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja keuangan.

### **Pengaruh Dana alokasi khusus Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil uji t variabel Dana alokasi khusus ( $X_3$ ) diperoleh nilai  $0,67 > 0,05$  dan t (hitung)  $-1,867$ . Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  $H_3$  ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa fluktuasi volume alokasi DAK belum menjadi determinan utama dalam mengeskalasi performa keuangan daerah. Kondisi tersebut terjadi karena sifat DAK yang bersifat *earmarked funding*, di mana otoritas daerah tidak memiliki diskresi penuh dalam pengelolaannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Candra Ismayasari et al., 2024), yang menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.

### **Pengaruh Dana bagi hasil Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil uji t variabel Dana bagi hasil ( $X_4$ ) diperoleh nilai  $0,489 > 0,05$  dan t (hitung)  $-0,697$ . Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  $H_4$  ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang tidak signifikan pada variabel DBH mencerminkan adanya ketidakpastian fiskal bagi daerah. Fluktuasi nilai DBH yang sangat bergantung pada dinamika penerimaan negara menyebabkan dana ini kurang efektif dijadikan pilar utama dalam stabilitas anggaran daerah. Selain itu, faktor ketimpangan potensi wilayah turut berperan; daerah tanpa keunggulan sumber daya alam atau sektor pajak yang kuat cenderung menerima proporsi DBH yang rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Anikmah Musfirati, 2019), yang menunjukkan temuan bahwa Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

### **Pengaruh Belanja modal Terhadap Kinerja keuangan**

Berdasarkan hasil uji t variabel Belanja modal ( $X_5$ ) diperoleh nilai  $0,263 > 0,05$  dan t (hitung)  $-1,132$ . Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  $H_5$  ditolak, hasil ini menunjukkan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.

Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, manfaat belanja modal bersifat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak dapat dirasakan secara langsung pada tahun anggaran yang sama. Belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan fasilitas publik memerlukan waktu agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun efisiensi keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (D. N. Prastiwi & Aji, 2020), yang menunjukkan hasil bahwa variabel Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan adanya kecenderungan ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang dapat menghambat kemandirian daerah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa dana transfer bersifat khusus maupun fluktuatif serta belanja modal yang berdampak jangka panjang belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara langsung dalam periode penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode yang relatif singkat, jumlah variabel yang terbatas, serta cakupan sampel yang hanya pada satu provinsi, sehingga disarankan penelitian selanjutnya memperpanjang periode observasi, menambah variabel lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi, pinjaman daerah, dan inflasi, serta memperluas cakupan wilayah agar hasil penelitian lebih komprehensif dan representatif.

#### 5. REFERENCES

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4). <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216>.
- Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 103–120. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.102>.
- Amalia Fauziah, et all. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Anandiyaswara, B. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. *Action Research Literate*, 8(7). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i7.457>.
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227/882>.
- Anikmah Musfirati, H. S. (2019). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 5, 20–36.

- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>.
- Aryllan, N., & Achmad. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Serta Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalbar. *Prosiding Program Studi Ekonomi Islam*, 2, 261–272.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>.
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansiv Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>.
- Ayu Rohanda, & Azhar, I. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuanganj Daerah (Studi pada Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(5), 287–301. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i5.8367>.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>.
- Candra Ismayasari, Yuwita Ariessa, & Wikan Budi. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus Dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 48–57. <https://doi.org/10.69714/7d235309>.
- Daerah, P. P., Daerah, R., Umum, D. A., Alokasi, D., Alivia, S., Purwanti, M., & Kunci, K. (2025). Proceeding FRIMA ( Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi ) The Influence of Regional Taxes , Regional Levies , General Allocation Funds , Special Allocation Funds , and Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures and their Impact on Regional Fin. 01(08), 2339–2345.
- Deviani, Rasyid, E. R., Yonedi, E., & Handra. (2020). Theoretical in indonesian local government accounting research: 2000-2019. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6 Special Issue), 977–992.
- Diky Alfitra Desky1, E. S. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. 7(1), 47–60. *Jurnal Trias Politika*.
- Eryana, D. V., Istiqomah, D. F., Anandyta, O., & Amalia, Z. R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keungan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 408–419.

- Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, & Salma Putri Mellinia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>.
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 315–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10043776>.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>.
- Ichsan, I., & Zurrahmi, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i1.8897>.
- Imami, P. R., & Akbar, F. S. (2024). The Influence Of General Allocation Funds And Capital Expenditures On The Financial Performance Of Regency / City Regional Governments In East Java Province In 2018-2022. 4(1), 216–224.
- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Hilan. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>.
- Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1.
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumua, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Maharani, N., Maria, M., & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(4), 576–589. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i4.15889>.
- Meylani. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan

- Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. 20(01), 1–11. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Muhamad Rafi Firdaus, Husen Saeful Anwar, I. M. (2022). Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 Di Kota Bandung. 2(12), 4129–4138. Jurnal Inovasi Penelitian.
- Murdaya, J., & Syahril. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simeulue. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 245–254. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.293>.
- Nareswari. (2018). Nareswari Listya Nindita 1 , Sri Rahayu 2 1,2. 2(1), 12–19.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>.
- Noeng, A. Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 2(2), 184–190. <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.184>.
- Nurul Arbila, Yani Rizal, & Iskandar Iskandar. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240–249. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.741>.
- Okynawa, S., Sulistyo, S., & Mustikowati, R. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum( DAU ), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) Terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Se - Jawa Timur ( APBD Tahun Anggaran 2016 ) Sulistyo. 6(1), 1–15.
- Padang, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 6(1), 163–176. <https://doi.org/10.54367/jimat.v2i2.3142>.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>.
- Ida Bagus Badjra, I Ketut Mustanda & Nyoman Abundanti. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah

- Pos, J. T. (2015). Jawa Tengah Diminta Gali Potensi Sumber Pajak Lain. *Jatengprov*, 6–8. <https://jatengprov.go.id/publik/2023-realisasi-pendapatan-daerah-jateng-capai-rp25369-triliun>.
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>.
- Prastiwi, D. N., & Aji, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.379>.
- Putri, & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Putri, V. U. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>.
- Putu, G., & Jana, A. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. 4(2), 95–104. *Bisma: Jurnal Manajemen*.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>.
- Rita Martini, Lesy Lorensa, D. A. (2022). Pajak daerah, lain-lain pad yang sah, dan belanja modal: bukti empiris provinsi sumatera selatan. 5(2), 271–278. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247>.
- Rizalni, R. A., Dona, E., & Keuangan, A. (2023). Berpengaruhkah Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 1(4). *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*.
- Silvy Theovilia Refialy, L. G. L. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 1,2,3). 2(11), 1639–1650. *Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis*.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of*

Economics and Business, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>.

Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>.

Soesilo, A. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 21.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (P. D. Sugiyono (ed.); Vol. 2, Issue 1). Alfabeta.

Tri, A. S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.

Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Sopia, S. (2023). Analisis Stabilitas Keuangan dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Pendekatan Teori Keagenan. 3(4), 519–528. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.643>.

Yusmalina, Lasita, F. H. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan PENDAPATAN Daerah Kabuapten Karimun Periode Tahun 2016-2018. 1(1), 13–21.